

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Latar Belakang Desa Ngrance

###### a. Sejarah Ngrance

Desa Ngrance terletak pada wilayah dataran rendah dengan luas 151,6 ha. Pusat pemerintahan Desa Ngrance terletak di Dusun Ngrance, RT.001 RW.001 menempati areal lahan seluas 1259 m<sup>2</sup>, memiliki potensi besar dibidang perekonomian yaitu pasar desa yang merupakan salah satu aset Pemerintahan Desa Ngrance. Masa Pemerintahan Desa Ngrance dari tahun 1830 sampai sekarang telah mengalami beberapa masa kepemimpinan, terpapar dalam tabel berikut :

Tabel 4.1  
**Masa Kepemimpinan Kepala Desa  
Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung<sup>121</sup>**

No	Nama Kepala Desa	Dari Tahun	Sampai Tahun
1.	Kromoyono	1830	1866
2.	Ragil	1866	1903
3.	Kadiyo	1903	1912
4.	Ronowiryo	1912	1920
5.	Iro Karso	1920	1925
6.	Ponjoredjo alias Pegeng	1925	1930
7.	Karsodimedjo	1930	1933
8.	Martoredjo alias Kento	1933	1954
9.	Mukidjan alias Karsohardjo	1954	1972
10.	Sukajdi	1972	1990
11.	Soekono	1990	2007
12.	Slamet	2007	Sekarang

Sumber : Gambaran umum desa dan kondisi Desa Ngrance, dikutip Tahun 2018

---

<sup>121</sup> Dokumen Perubahan Atas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015

- a. Visi : membangun masyarakat desa yang bermartabat
- b. Misi :
  - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, terdiri dari penghasilan tetap dan tunjangan, operasional BPD, operasional LPM (Lembaga pemberdayaan Masyarakat), operasional atau intensif RT dan RW, penyelenggaraan MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), penyelenggaraan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), penyelenggaraan BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat), penyelenggaraan PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional) Republik Indonesia, pembangunan atau rehab pagar balai desa.
  - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan, terdiri dari pembangunan plengsengan atau talud, pembangunan jalan paving, rehab saluran irigasi, pembangunan saluran irigasi, pembangunan drainase atau sanitasi lingkungan, pembangunan jalan makadam, PMT (Pemberian Makanan Tambahan) gizi pada posyandu balita atau lansia, pengadaan bibit tanaman penghijauan.
  - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, terdiri dari : pengadaan sarana dan prasarana olah raga, bidang pemberdayaan masyarakat : pelatihan tim penyusun RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), RKP (Rencana Kerja

Pemerintah), Musrenbang, pelatihan usaha ekonomi, pertanian, bantuan kelompok usaha ekonomi produktif, kegiatan PKK atau perempuan, kegiatan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), dan kegiatan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa).

**a. Aspek Geografis**

Desa Ngrance merupakan salah satu dari 19 Desa yang terletak di Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Gebang Kecamatan Pakel
- b. Sebelah Timur: Desa Wates Kecamatan Pakel
- c. Sebelah Selatan : Desa Kasreman Kecamatan Pakel
- d. Sebelah Barat : Desa Bangunjaya Kecamatan Pakel

Gambar 4.1

**Peta Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung<sup>122</sup>**

Sumber : Peta Kecamatan Pakel,

Tabel 4.2

**Nama-nama Desa di Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung<sup>123</sup>**

No	Nama Desa	No	Nama Desa
1	Bangunjaya	11	Ngrance
2	Bangunmulyo	12	Pakel
3	Bono	13	Pecuk
4	Duwet	14	Sambitan
5	Gebang	15	Sanan
6	Gempolan	16	Sodo
7	Gesikan	17	Sukoanyar
8	Gombang	18	Suwaluh
9	Kasreman	19	Tamban
10	Ngebong		

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

<sup>122</sup> Peta Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung dalam <https://singoutnow.wordpress.com>

<sup>123</sup> Ngrance, Pakel, Tulungagung [www.wikiwand.com](http://www.wikiwand.com)

Desa Ngrance terletak pada wilayah dataran rendah dengan luas 151,6 ha, terbagi menjadi 2 Dusun yaitu Dusun Ngrance dan Dusun Polos dengan persebaran 3 RW (Rukun Warga) dan 10 RT (Rukun Tetangga).

Gambar 4.2  
Peta Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten  
Tulungagung<sup>124</sup>



Sumber : Dokumen Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, dikutip Tahun 2018

<sup>124</sup> Dokumentasi Peta Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung

## b. Aspek Demografi

Demografi bertujuan untuk mengetahui distribusi penduduk dalam suatu daerah serta menjelaskan pertumbuhan penduduk masa lampau, penurunannya dan persebarannya dengan sebaik-baiknya melalui data yang tersedia. Manfaat aspek demografi untuk perencanaan pembangunan, evaluasi kinerja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melihat perubahan komposisi penduduk yang ada sekarang, sehingga dapat meningkatkan standar kehidupan melalui tingkat harapan hidup rata-rata penduduk.

Laporan kependudukan Desa Ngrance Tahun 2015, 2016 dan 2017, bahwa perkembangan penduduk Desa Ngrance senantiasa bertambah jumlah penduduk yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.3  
**Data Kependudukan**  
**Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung**<sup>125</sup>

Bulan	Tahun 2015		Jumlah	Tahun 2016		Jumlah	Tahun 2017		Jumlah
	L	P		L	P		L	P	
Januari	1153	1153	2306	1153	1153	2306	1173	1151	2324
Pebruari	1155	1154	2309	1156	1155	2311	1172	1151	2323
Maret	1151	1153	2304	1152	1153	2305	1172	1149	2321
April	1149	1153	2302	1148	1154	2302	1173	1150	2323
Mei	1148	1152	2300	1149	1152	2301	1175	1149	2324
Juni	1152	1154	2307	1152	1154	2306	1174	1149	2323
Juli	1153	1154	2307	1152	1155	2307	1176	1155	2331
Agustus	1153	1155	2308	1153	1155	2308	1174	1149	2323
September	1157	1159	2316	1156	1159	2315	1173	1152	2325
Oktober	1156	1157	2313	1155	1161	2316	1171	1145	2316
Nopember	1158	1159	2317	1153	1159	2314	1171	1147	2318
Desember	1157	1158	2315	1157	1158	2323	1173	1144	2317

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

<sup>125</sup> Laporan Kependudukan Desa Ngrance, Tahun 2018

### c. Aspek Sumber Daya Pembangunan

Ketersediaan sumber daya pembangunan mutlak diperlukan dalam rangka menentukan langkah, arah serta strategi pembangunan di desa secara tepat. Masyarakat membutuhkan sumberdaya pembangunan sebagai penunjang sarana prasarana kegiatan di desa, seperti balaidesa merupakan bangunan yang dibuat sebagai wadah masyarakat dalam bermusyawarah dan berbagai acara yang melibatkan masyarakat dalam jumlah banyak, juga sebagai pusat pemerintahan desa.

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui, program peningkatan serta pengembangan pembangunan gedung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-kanak), SD (Sekolah Dasar), dalam peningkatan kesehatan melalui Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) dan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Sumber daya pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4  
**Daftar Sumber Daya Pembangunan  
Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung<sup>126</sup>**

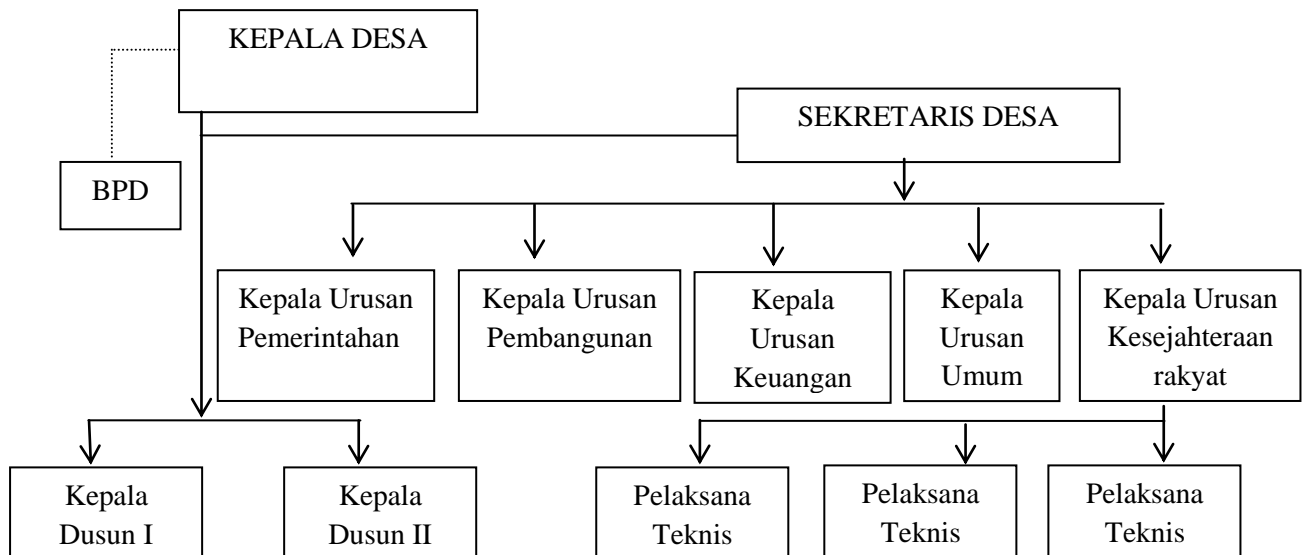
No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1	Balai Desa	1	Unit
2	Pasar Desa	1	Unit
3	Gedung SD	2	Unit
4	Gedung TK	1	Unit
5	Gedung Paud	1	Unit
6	Masjid	4	Unit
7	Mushola	8	Unit
8	Poskesdes	1	Unit
9	Posyandu	3	Unit

Sumber : Data pembangunan Desa Ngrance, dikutip Tahun 2018

<sup>126</sup> Dokumen Perubahan Atas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015

#### d. Struktur Organisasi

Gambar 4.3  
**Struktur Organisasi**  
**Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung<sup>127</sup>**



Sumber : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, dikutip Tahun 2018

<sup>127</sup> *Ibid.*,



Tabel 4.5  
**Daftar Nama Perangkat Desa**

No	Nama	Jabatan
1	Slamet	Kepala Desa
2	-	Sekretaris
3	Yusup, S.Pd	Ketua BPD
4	Sasmito	Kepala Dusun I
5	Jarmanto	Kepala Dusun II
6	Sujoko	Kepala Urusan Umum
7	Endang R.	Kepala Urusan Keuangan
8	Sunardi	Kepala Urusan Pemerintahan
9	Suprianto	Kepala Urusan Pembangunan
10	Gunawan	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
11	Kasman	Pelaksana Teknis
12	Samuji	Pelaksana Teknis
13	Samud	Pelaksana Teknis

Sumber : Papan Struktur Pemerintahan Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, dikutip Tahun 2018

## **b. Latar Belakang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD)**

### **a. Sejarah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

Visi dan Misi DPMD Kabupaten Tulungagung

#### 1) Visi

Terwujudnya peningkatan kemandirian masyarakat melalui penguatan lembaga perekonomian desa dan partisipasi masyarakat

#### 2) Misi

- a) Menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan melalui optimalisasi lembaga perekonomian yang didukung dengan sarana prasarana
- b) Mengembangkan keberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam

- c) Meningkatkan partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan
- d) Meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintah desa guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
- e) Meningkatkan peran pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ke seluruh lapisan masyarakat

#### **b. Demografis**

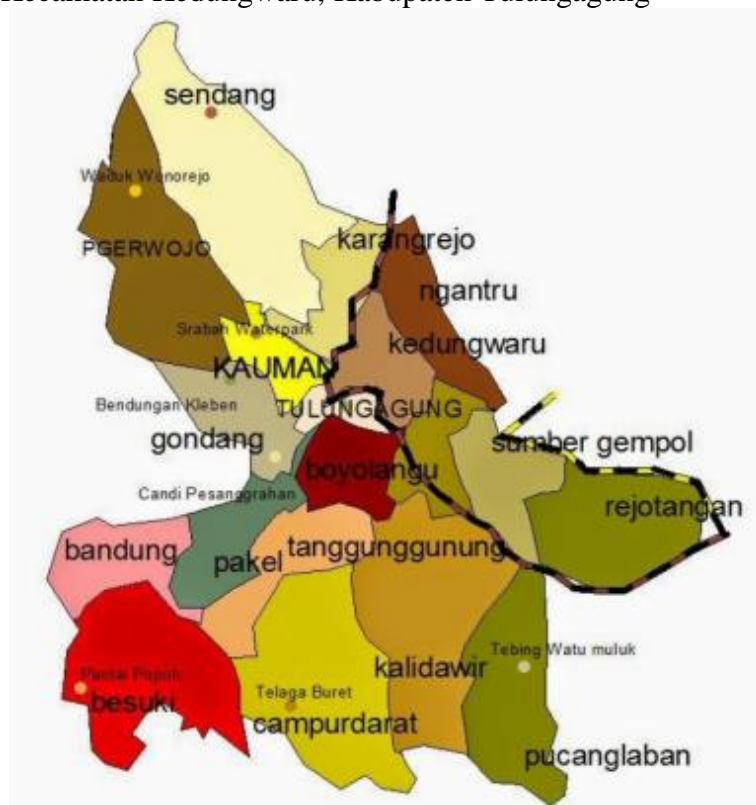
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung pelaksanaannya diatur oleh peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung yang tugasnya melaksanakan urutan pemerintah daerah berdasarkan atas otonomi dalam mengidentifikasi persoalan, menyusun strategi dan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang terletak di Tulungagung Provinsi Jawa Timur, merupakan lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan di seluruh Kabupaten Tulungagung dengan jumlah desa sebanyak 257 Desa 19 Kecamatan, melalui kemampuan dalam memonitor, mengevaluasi, dan menyempurnakan rencana pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa sehingga mampu meningkatkan kompetensi seluruh SDM (Sumber Daya Manusia).

### c. Geografis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung secara administrasi wilayah terletak di Jl. Sultan Agung No. 20 Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, sebelah utara DPMD adalah Kecamatan Karangrejo, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kauman, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sumbergempol dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tulungagung. Pembagian batas wilayah Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dapat dilihat gambar berikut :

Gambar 4.4  
Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung<sup>128</sup>



<sup>128</sup> Peta Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dalam <https://womenraven.blogspot.com>

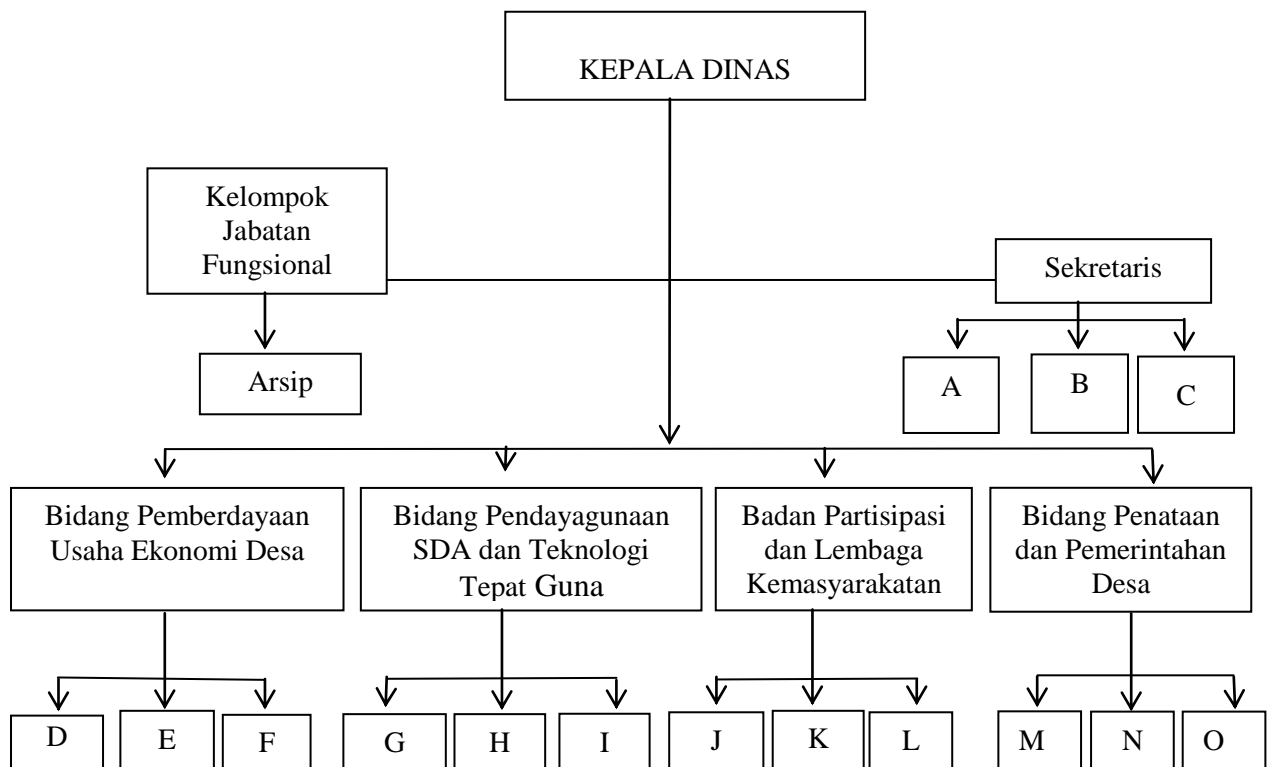
Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung dengan luas 1.150,41 km<sup>2</sup> terletak pada posisi 111°43' sampai dengan 112°07' Bujur Timur dan 720°51' sampai dengan 8°18' Lintang Selatan. Wilayahnya berbentuk dataran yang subur pada bagian utara, tengah dan timur, sebagian ada pegunungan dan Samudra Indonesia sepanjang batas selatan, serta terletak 154 km Barat Daya dari Kota Surabaya.

Ditinjau dari segi administrasi Kabupaten Tulungagung memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara adalah Kabupaten Kediri.
- 2) Sebelah Selatan adalah Samudra Indonesia.
- 3) Sebelah Timur adalah Kabupaten Blitar.
- 4) Sebelah Barat adalah Kabupaten Trenggalek.

#### d. Struktur Organisasi

Gambar 4.5  
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tahun 2017<sup>129</sup>



Sumber : Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tulungagung, dikutip Tahun 2018

Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung, terdiri dari 50 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian maupun staf, serta 6 tenaga honorarium yang bekerja dibawah naungan kelembagaan sebagai tenaga yang membantu pada tugas sopir mobil dinas, penjaga malam, dan tenaga pembersih.

<sup>129</sup> Dokumen Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017

Daftar nama-nama pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung, Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS sebagai berikut:

Tabel 4.6  
**Daftar Nama PNS (Pegawai Negeri Sipil)  
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Tahun 2018<sup>130</sup>**

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Eko Asistono, M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	Iswahjudi, SIP, M.Si	Sekretaris
3	Diah Margawati, SE, MM	Kepala Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan
4	Drs. Ali Muchtar	Kepala Bidang Penataan Pemerintah Desa
5	-	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
6	Drs. Totok Joko Purwantoro	Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)
7	Yuni Astutik, SE	Kepala Sub Bidang keuangan
8	Drs. Anasrudin	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Desa
9	Edi Santoso, SE, MM	Kasi Sarana Prasarana Sumber Daya Alam (SDA) usaha ekonomi masyarakat
10	Ahmad Muhaimin, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Tertinggal atau miskin
11	Efif Sakti Wibowo, S.STP	Kasi Kerjasama Antar Desa
12	Vidi Gestananto, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum
13	R. Satriardi, S.Sos	Kasi pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi masyarakat
14	Nurhadi Alfatah, SE	Kasi teknologi tepat guna
15	Inggit Yulia Puspita Dewi, M.Si	Kepala sub bagian bina program
16	Sri Wulan Purwasarjana, SH	Kasi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) pedesaan
17	Dian Naufalia, SE	Kasi partisipasi masyarakat
18	Mischael Sondak	Kasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
19	Suhardjito, SE	Kasi lembaga adat dan sosial kemasyarakatan
20	Imam Romdoni, SE	Kasi lembaga pemerintahan dan aset desa
21	Wahyu Yuniarko, SE	Kasi administrasi pemerintahan desa
22	Dra. Endang Susilowati	Staf

Dilanjutkan. . .

<sup>130</sup> Dokumen Daftar Nama PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung

Lanjutan. . .

23	Istifadah, S.Sos	Staf
24	Agus Riyanto, S.Sos	Staf
25	Siti Maisaroh	Staf
26	Siti Asnah	Staf
27	Maskur Arifin, SE	Staf
28	Haryanah	Staf
29	Mudawamah	Staf
30	Kun Marsini	Staf
31	Nanang Indra Bahtiar, S.Sos	Staf
32	Adi Cahyanto, SE	Staf
33	Chandra Kusuma Amidia, SH	Staf
34	Siti Isroin	Staf
35	Gatot Karyadi P.	Staf
36	Agus Wahyu Triono	Staf
37	Jahuri	Staf
38	Wawan Iswanto	Staf
39	Winaryo	Staf
40	Bambang Suhirman	Staf
41	Apriani	Staf
42	Cholief Hadi Siswanto	Staf
43	RR. Dian Handayani Basuki	Staf
44	Diana Mery Pravitasari	Staf
45	Fitriyah Abbad	Staf
46	Carolina Triswidya Armadani	Staf
47	Siti Sholikah	Staf
48	Samsodin	Staf
49	Anang Prayoga	Staf
50	Haryani	Staf

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, dikutip Tahun 2018

Tabel 4.7  
**Daftar Nama Tenaga Honorarium  
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Tahun 2018<sup>131</sup>**

No	Nama	Jabatan
1	Supiyan	Tenaga penjaga malam
2	Ilyas Munaseh	
3	Eko Wahyudi	Tenaga sopir
4	Arief Setiawan, SE	
5	Siti Zulaikah, S.Pd	Tenaga pembersih
6	Susiah	

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, dikutip Tahun 2018

<sup>131</sup> Dokumen Daftar Nama PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung

## B. Temuan Penelitian

Analisis data merupakan tahap yang bermanfaat dalam penelitian kualitatif untuk menelaah data yang telah diperoleh dari beberapa informan yang telah dipilih selama penelitian berlangsung, selain itu berguna untuk menjelaskan dan memastikan kebenaran temuan penelitian. Analisis data ini telah dilakukan sejak awal dan bersamaan dengan proses pengumpulan data lapangan.

Data yang disajikan pada temuan penelitian ini merupakan data hasil observasi, data hasil wawancara dengan lima informan. Data yang tidak terungkap melalui wawancara, dilengkapi dengan data hasil observasi langsung secara partisipatif yang dilakukan rentang waktu pada bulan Februari sampai dengan April, untuk memperkuat substansi data hasil wawancara dan observasi, maka dilakukanlah penelusuran terhadap dokumen dan arsip yang ada, berikut adalah informan kunci pada penelitian ini :

Tabel 4.8  
Daftar Informan

No	Informan	Jabatan	Pelaksanaan Wawancara
1	Drs. Anasrudin	Kepala seksi Perencanaan dan Pembangunan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung	4 April 2018
2	Slamet	Kepala Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung	3 April 2018
3	Sunardi	Plt. Sekretaris Desa Ngrance	19 Maret 2018
4	Sasmito	Kepala Dusun Ngrance	19 Maret 2018
5	Jarmanto	Kepala Dusun Ploso	19 Maret 2018

Sumber : Data primer, dikutip Tahun 2018



Data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Pertimbangan sebelum melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur desa.

“Bapak Sasmito mengatakan, diadakan musyawarah antar Dusun, setiap RT (Rukun Tetangga) mengirimkan 10 orang, dikumpulkan disini kemudian musyawarah apa yang akan dibangun pada Tahun yang akan datang.”<sup>132</sup>

“Bapak Jarmanto mengatakan, sebelum perencanaan pembangunan mengumpulkan masyarakat untuk musyawarah mengumpulkan yang dibangun”<sup>133</sup>

“Bapak Sunardi mengatakan, sebelum MUSRENBANGDes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), dilakukan musyawarah tingkat dusun masing-masing, tingkat dusun dihadiri oleh tokoh masyarakat, Ketua RT (Rukun Tetangga), Ketua RW (Rukun Warga) dan lembaga yang ada di dusun tersebut”<sup>134</sup>.

Kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur desa, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Ngrance dan Dusun Ploso, bahwa masing-masing dusun akan melakukan musyawarah tingkat dusun untuk menetapkan prioritas pembangunan yang akan diajukan pada saat MUSRENBANGDes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), sehingga program perencanaan pembangunan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Pernyataan Kepala Dusun, dikuatkan oleh Plt. Skretaris Desa bahwa sebelum mengusulkan perencanaan pembangunan perlu adanya rapat masing-masing dusun yang membahas mengenai kebutuhan

---

<sup>132</sup> F4.W1. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>133</sup> F5.W1. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>134</sup> F3.W1. Tanggal 19 Maret 2018

pembangunan sarana prasarana fisik dengan menghadirkan Ketua RT (Rukun Tetangga), Ketua RW (Rukun Warga) yang akan menyampaikan kebutuhan pembangunan di lingkungannya serta dihadiri tokoh masyarakat sebagai penasihat dan penghubung aspirasi masyarakat.

“Bapak Slamet mengatakan, bahwa dalam tahap perencanaan pembangunan, tiap perangkat membawahi RT satu-satu kemudian kelengkapan untuk melihat kondisi di lingkungan sekitar, apa yang perlu didahulukan baik pembangunan fisik maupun sosial, kemudian melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) dengan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), tokoh masyarakat maupun pihak lembaga terkait.<sup>135</sup>

Tahap yang harus dilaksanakan sebelum melakukan perencanaan pembangunan dengan tinjauan kelengkapan untuk mengetahui keadaan lingkungan masyarakat, sekaligus menjadi bahan pertimbangan atas usulan warga untuk memprioritaskan sarana prasarana penunjang yang dibutuhkan masyarakat, seperti halnya jalan pemukiman maupun jalan menuju sawah. Pemerintah dalam menyetujui usulan juga harus mempertimbangkan pembangunan tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi untuk lebih baik.

“Bapak Anasrudin, mengatakan perencanaan pembangunan sesuai aturan pusat dan Kabupaten serta juknis, dari itu diterapkan di Desa dalam MUSRENBANG Dusun (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat Dusun kemudian MUSRENBANGDes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), kemudian menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hingga terbit Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dalam APBDes ada proses yang harus dipertimbangkan melalui tahapan perencanaan dari bawah sampai muncul APBDes”.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> F2.W1. Tanggal 3 April 2018

<sup>136</sup> F1.W1. Tanggal 4 April 2018

Pernyataan Bapak Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Desa turut menjelaskan mekanisme alur perencanaan pembangunan, sesuai dengan aturan pemerintah pusat maupun daerah yang akan diterapkan di desa, sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan baik karena terstruktur dan sesuai dengan aturan, hal ini akan berdampak baik bagi kelangsungan proses pembangunan dan hasil yang maksimal.

Pertimbangan perencanaan diperlukan untuk mengembangkan strategi yang optimal dalam mencapai serangkaian tujuan yang diinginkan, setelah dipertimbangkan proses perencanaan ini akan menentukan tujuan yang akan dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

## 2. Perencanaan pembangunan Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung.

“Bapak Sasmito mengatakan apa yang diusulkan yang penting, kemudian dibawa ke MUSRENBANGDes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) dengan menjaring aspirasi dari bawah”.<sup>137</sup>

“Jarmanto mengatakan melalui usulan yang ditampung dibawa ke MUSRENBANGDes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)”.<sup>138</sup>

“Bapak Sunardi mengatakan, menanyai warga apa yang akan dibangun, dengan menampung banyak usulan kemudian menjadi bahan MUSRENBANGDes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Tim penyusun akan menyusun usulan dengan skala prioritas”.<sup>139</sup>

Tahap awal perencanaan pembangunan melalui musyawarah dari tingkat paling bawah yang dekat dengan masyarakat, akan memberikan

---

<sup>137</sup> F4. W2. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>138</sup> F5. W2. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>139</sup> F3. W2. Tanggal 19 Maret 2018

usulan-usulan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat sehingga Kepala Dusun, Ketua RT maupun RW mengusulkan usulan dari warga untuk disampaikan pada saat Musyawarah tingkat Desa.

Usulan yang telah diajukan oleh warga dan tokoh masyarakat akan ditampung pada saat MUSRENBANGDes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), selanjutnya pihak desa melalui tim penyusun akan menganalisis dan mempertimbangkan usulan pembangunan diwilayah masing-masing untuk dijadikan sebagai prioritas pembangunan.

“Bapak Slamet mengatakan, saya telah membawa data dan beberapa informasi yang akan dijadikan bahan musyawarah, disitulah saya akan menampung usulan-usulan dan kami padu padankan yang diajukan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) kemudian saya padu padankan dengan staf saya karena mereka telah mengetahui secara rinci keadaan lingkungan sekitarnya, sehingga kita dapat memutuskan prioritas mana yang akan kita dahulukan untuk mengoptimalkan pembangunan”.<sup>140</sup>

Pernyataan Bapak Sunardi, selaras dengan Kepala Desa bahwa perencanaan pembangunan Desa melalui tahap menampung usulan masyarakat, selanjutnya dilakukan pengecekan pada wilayah yang diusulkan melalui informasi dari perangkat desa, sehingga pemangku kebijakan dapat mengetahui lebih rinci kebutuhan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dan yang harus didahulukan.

“Bapak Anasrudin mengatakan mengacu pada aturan yang telah diberikan”.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> F2. W2. Tanggal 3 April 2018

<sup>141</sup> F1.W2. Tanggal 4 April 2018

Tahapan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa harus berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan, melalui musyawarah bersama warga hal ini akan memudahkan pihak desa sebagai tim penyusun dan pelaksana sekaligus memudahkan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) untuk memberikan arahan dan melakukan pemantauan pembangunan.

3. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa diterapkan dalam tahap perencanaan.

“Bapak Sasmito mengatakan, efektif karena sesuai kebutuhan dari bawah (masyarakat)”<sup>142</sup>

“Bapak Jarmanto mengatakan, penting untuk mengusulkan pembangunan”<sup>143</sup>

“Bapak Sunardi mengatakan, penting untuk menampung usulan masyarakat”<sup>144</sup>

Penerapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa, hal ini diperlukan sebagai komponen dalam menampung usulan masyarakat, efektif dilakukan setiap tahunnya untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan Desa, sehingga peran serta masyarakat dalam menyampaikan usulan diperlukan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan.

Pemerintah desa merupakan fasilitator yang menyediakan wadah untuk menampung usulan masyarakat sebagai daftar permasalahan dan usulan kegiatan desa dalam perencanaan pembangunan. Hal ini akan

---

<sup>142</sup> F4.W3. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>143</sup> F5.W3. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>144</sup> F2.W3. Tanggal 19 Maret 2018

menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pembangunan sarana prasarana didesanya, sehingga terjalin hubungan baik antara pihak pemerintah desa dan masyarakat.

“Bapak Slamet mengatakan, menurut saya sangat penting, bahkan kebijakan atau mungkin hal yang nyata, kalau musrenbang itu kan keputusan orang banyak yang dipertimbangkan, kalau saya menilai sekitar 75% dan kebijakan 25% karena kebijakan itu melangkah demi kecepatan”<sup>145</sup>

Pengambilan keputusan dalam perencanaan berorientasi ke masa depan dan disusun untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul di masa yang akan datang, sehingga tidak sepenuhnya mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa, melainkan mempertimbangkan kebijakan untuk memutuskan perencanaan yang berimbang dan tidak keluar dari aturan yang berlaku.

“Bapak Anasrudin mengatakan, penting untuk mempermudah pelaksanaan, melalui prioritas perencanaan”.<sup>146</sup>

Prioritas perencanaan dalam sebuah pembangunan diperlukan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) didalamnya ada proses yang harus dipertimbangkan yaitu tahap-tahap perencanaan dari awal hingga tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

4. Program pembangunan yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan.

“Bapak Sasmito mengatakan yang di prioritaskan jalan paving dan *talud* (penyangga jalan)”.<sup>147</sup>

---

<sup>145</sup> F2. W3. Tanggal 3 April 2018

<sup>146</sup> F1. W3. Tanggal 4 April 2018

<sup>147</sup> F4.W4. Tanggal 19 Maret 2018

“Bapak Jarmanto mengatakan, *talud* (penyangga jalan), makadam dan jembatan. *Talud* (penyangga jalan). penting sebagai penyangga jalan, makadam untuk jalur pertanian”.<sup>148</sup>

“Bapak Sunardi mengatakan, paving, jembatan, rabat, makadam, saluran irigasi disawah serta sanitasi lingkungan”.<sup>149</sup>

Infrastruktur jalan bukan hal sosial masyarakat yang merupakan tempat bertumbuh dalam perkembangan ekonomi, namun tanpa ketersediaan infrastruktur jalan dan pembangunan sarana prasarana yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi akan sulit dicapai. Hal ini melatarbelakangi kebutuhan jalan sebagai prioritas pembangunan.

Memiliki infrastruktur jalan yang lengkap dan kemudahan dalam akses, menjadi daya tarik besar untuk kegiatan pertanian karena mayoritas penduduk sebagai petani. Infrastruktur jalan juga berdampak baik bagi pedagang di pasar desa, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Prioritas pembangunan tidak hanya pada peningkatan infrastruktur jalan melainkan kebutuhan pembangunan fisik lainnya, seperti sanitasi lingkungan diperlukan untuk memudahkan penyerapan air dan aliran air ke sungai besar, hal ini menjadi prioritas karena kondisi desa yang sering mendapat kiriman air dari desa-desa lain sehingga menyebabkan banjir dimusim penghujan.

“Bapak Slamet mengatakan pembangunan fisik yang arahnya untuk pertanian seperti irigasi jalan pertanian, *talud* (penyangga

---

<sup>148</sup> F5.W4. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>149</sup> F3.W4. Tanggal 19 Maret 2018

jalan), karena mayoritas masyarakat Desa Ngrance itu petani jadi arah pembangunan ke pertanian”.<sup>150</sup>

Arah kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan dengan menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi, termasuk kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal dalam kondisi ini yaitu pertanian sebagai potensi yang diutamakan. Hal ini dapat mendorong usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak dapat diperbarui kepada Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat diperbarui menuju masyarakat yang berkualitas, maju dan mandiri dalam keanekaragaman penduduk dan kegiatannya.

“Bapak Anasrudin mengatakan harus mengacu pada aturan, kemudian dimusyawarahkan mana yang lebih menjadi prioritas di Desa”.<sup>151</sup>

Ketidakterediaan infrastruktur yang memadai akan berdampak buruk bagi suatu wilayah atau negara seperti rendahnya kualitas hidup, kesulitan dalam pemberantasan kemiskinan serta menurunkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Aturan yang diberikan pemerintah pusat maupun daerah merupakan pedoman dalam upaya meningkatkan ketersediaan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan. Hal ini berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat lebih sejahtera.

5. Latar belakang atau alasan pengusulan pembangunan dalam tahap perencanaan.

---

<sup>150</sup> F2.W4. Tanggal 3 April 2018

<sup>151</sup> F1.W4. Tanggal 4 April 2018



“Bapak Jarmanto mengatakan memprioritaskan yang parah dan harus disegerakan”.<sup>152</sup>

“Bapak Sasmito mengatakan mempertimbangkan kebutuhan untuk diprioritaskan seperti saluran air, menanggulangi banjir di musim hujan”.<sup>153</sup>

“Bapak Sunardi mengatakan pemerataan pembangunan pada seluruh wilayah desa”.<sup>154</sup>

Pernyataan informan tersebut dikuatkan kondisi desa saat curah hujan yang tinggi disertai kiriman air dari desa-desa sekitar menyebabkan sering terjadi banjir, sehingga perlu adanya saluran air untuk menanggulangi banjir. Hal ini yang menjadikan *drainase* sebagai prioritas pembangunan. Ketersediaan saluran air dilikungan rumah warga selain menanggulangi banjir juga berdampak baik bagi lahan resapan lingkungan, sekaligus air dapat dialirkan langsung ke sungai besar.

Pemerataan pembangunan dibutuhkan untuk mencapai efektifkan dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah tercapai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata.

“Bapak Slamet mengatakan, mendahulukan pembangunan mendesak, melalui skala prioritas”<sup>155</sup>

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas program pemerintah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya pembangunan yang terencana dan sistematis pada sektor yang di prioritaskan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia

---

<sup>152</sup> F5.W5. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>153</sup> F4.W5. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>154</sup> F3.W5. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>155</sup> F2.W5. Tanggal 3 April 2018

secara optimal, efektif dan efisien dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

“Bapak Anasrudin mengatakan, prioritas pembangunan desa yang sudah ditetapkan pada saat MUSRENBANGDes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)”<sup>156</sup>.

Hal-hal yang melatarbelakangi pembangunan berorientasi kemanfaatan bagi masyarakat dan prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional melalui pemerataan pembangunan yang dimulai dari lingkup desa. Perencanaan pembangunan yang di tetapkan merupakan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi desa.

6. Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung.

“Bapak Sasmito mengatakan, musyawarah Dusun, kemudian saat Musrenbang Desa Ok, maka menunggu dana turun, kemudian dibuatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan)”<sup>157</sup>.

“Bapak Jarmanto mengatakan tahapannya sesuai jadwal pemerintah desa”<sup>158</sup>.

“Bapak Anasrudin menyatakan pelaksanaan pembangunan mengacu pada aturan sesuai pada petunjuk teknis”<sup>159</sup>.

Kegiatan prioritas tahunan desa yang diajukan, dalam pelaksanaannya harus mengacu pada petunjuk teknis. Program pembangunan yang akan dilaksanakan di umumkan oleh Kepala Desa, untuk mendorong masyarakat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan tersebut.

---

<sup>156</sup> F1.W5. Tanggal 4 April 2018

<sup>157</sup> F4.W6. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>158</sup> F5.W6. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>159</sup> F1.W6. Tanggal 4 April 2018

Hasil musyawarah Dusun telah disetujui pada saat MUSRENBANGDes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), tahap selanjutnya menunggu jadwal pencairan dana desa yang telah dianggarkan dari pemerintah selanjutnya dibentuk TPK (Tim Pengelola Kegiatan) untuk melaksanakan proses pembangunan di tingkat desa. Jadwal pembangunan disesuaikan dengan petunjuk teknis yang diberikan pemerintah daerah sebagai pedoman pelaksanaan.

“Bapak Sunardi menyatakan pelaksanaan pembangunan desa harus memperhatikan kontur tanah dan cuaca, agar pembangunan berjalan lancar”.<sup>160</sup>

“Bapak Slamet menyatakan pembangunan jalan di *talud* (penyangga jalan) kemudian pengurukan terakhir disesuaikan di makadam maupun paving”.<sup>161</sup>

Kondisi tanah desa yang masih sering mengalami pergerakan, dapat menyebabkan jalan menjadi rusak. Pelaksanaan pembangunan jalan harus memperhatikan cuaca karena jika pada saat musim penghujan, pembangunan akan terkendala genangan air. Solusi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, pada saat pelaksanaan dengan terlebih dahulu membuat *talud* (penyangga jalan) kemudian dilakukan pengurukan sehingga dapat dijadikan jalan paving maupun makadam yang baik.

#### 7. Program pengadaan sarana prasarana desa Tahun Anggaran 2017.

“Bapak Sasmito mengatakan, pengadaan jalan paving dan saluran irigasi”.<sup>162</sup>

---

<sup>160</sup> F3.W6. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>161</sup> F2.W6. Tanggal 3 April 2018

<sup>162</sup> F4.W7. Tanggal 19 Maret 2018

“Bapak Jarmanto mengatakan, jembatan, makadam dan *talud* (penyangga jalan)”<sup>163</sup>

“Bapak Slamet mengatakan, pengadaan pompa air, irigasi bawah tanah untuk mengairi lahan persawahan di Desa Ngrance”<sup>164</sup>

Kondisi desa yang mayoritas penduduknya sebagai petani, menjadikan saluran irigasi sebagai program yang di usulkan, selain itu kualitas jalan yang bagus juga mempermudah membawa hasil panen. Selain sektor pertanian, jalan juga berkontribusi bagi kelangsungan perdagangan di pasar desa yang menjadi penggerak roda perekonomian, begitupun jembatan yang di bangun sebagai konektivitas antar desa.

“Bapak Anasrudin mengatakan, pengadaan barang jasa dengan swakelola”<sup>165</sup>.

Ketentuan pengadaan barang jasa dengan swakelola, akan tetapi tetap mengacu pada aturan dari pusat dan Kabupaten. Petunjuk teknis diberikan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan dan mengelola pelaksanaan pembangunan sehingga sesuai dengan keputusan (MUSRENBANGDes) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, yakni masyarakat dengan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.

“Bapak Sunardi mengatakan, pengadaan barang lancar, namun terkadang memerlukan kerja tambahan untuk sampai di lokasi karena jalan yang sempit tidak bisa dimasuki mobil pembawa material”<sup>166</sup>.

---

<sup>163</sup> F5.W7. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>164</sup> F2.W7. Tanggal 3 April 2018

<sup>165</sup> F1.W7. Tanggal 4 April 2018

<sup>166</sup> F3.W7. Tanggal 19 Maret 2018

Pengadaan barang berjalan lancar, namun terjadi kendala pada saat pendistribusian karena kondisi jalan yang akan dibangun sempit, mengharuskan desa mengambil kebijakan untuk memberikan solusi agar pengadaan pembangunan berjalan lancar dan tidak mengalami keterlambatan dengan memfasilitasi kereta dorong untuk membawa material ke lokasi pembangunan yang susah di jangkau.

#### 8. Program pembangunan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2017.

“Bapak Slamet mengatakan pembangunan jalan paving supaya jalan lebih bagus”.<sup>167</sup>

“Bapak Sunardi mengatakan, merabat (perbaikan) *talud* (penyangga jalan), untuk memperbaiki jalan”.<sup>168</sup>

“Bapak Sasmito mengatakan pembangunan paving, *talud* (penyangga jalan), dan *drainase* (saluran air) dengan lokasi tersebar”.<sup>169</sup>

“Bapak Jarmanto mengatakan pembangunan *talud* (penyangga jalan) dan makadam”.<sup>170</sup>

Berdasarkan kebutuhan desa, pembangunan jalan dijadikan capaian fisik kualitas tinggi dan tepat waktu sebagai perbaikan konektivitas antar desa supaya dapat berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur jalan antar desa dengan desa maupun desa dengan Kabupaten merupakan sarana mobilitas untuk melakukan berbagai proses transaksi. Jalan sebagai struktur ruang nasional memiliki keterkaitan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi.

“Bapak Anasrudin mengatakan mengikuti kebutuhan desa yang telah diusulkan untuk dibangun”.<sup>171</sup>

---

<sup>167</sup> F2.W8. Tanggal 3 April 2018

<sup>168</sup> F3.W8. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>169</sup> F4.W8. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>170</sup> F5.W8. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>171</sup> F1.W8. Tanggal 4 April 2018

Pembangunan desa menggunakan konsep kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi dan partisipasi masyarakat melalui gerakan lokal. Menjadikan desa sebagai ujung depan yang dekat dengan masyarakat. Hal ini mendasari program pembangunan yang direncanakan, untuk disesuaikan pada kebutuhan desa dengan harapan mengembangkan peran kapasitas desa.

9. Pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur desa.

“Bapak Slamet mengatakan, desa bekerjasama dengan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)”.<sup>172</sup>

“Bapak Sunardi mengatakan, desa sebagai penanggung jawab”.<sup>173</sup>

“Bapak Sasmito mengatakan, penanggung jawabnya pihak Desa”.<sup>174</sup>

“Bapak Jarmanto mengatakan, penanggung jawab pelaksanaan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)”.<sup>175</sup>

“Bapak Anasrudin mengatakan, Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) namun pemegang kekuasaan penuh Kepala Desa”.<sup>176</sup>

Berdasarkan pemaparan informan bahwa penanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur desa yaitu Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menganggarkan biaya pengadaan barang hingga pelaksanaan pembangunan. Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sebagai delegasi pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Pemerintah desa sebagai

---

<sup>172</sup> F2.W9. Tanggal 3 April 2018

<sup>173</sup> F3.W9. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>174</sup> F4.W9. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>175</sup> F5.W9. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>176</sup> F1.W9. Tanggal 4 April 2018

penyelenggara urusan pemerintahan, mengatur kepentingan masyarakat dalam hal ini sebagai penanggung jawab utama.

#### 10. Jangka waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan pembangunan.

“Bapak Slamet mengatakan, jangka waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kebijakan”.<sup>177</sup>

“Bapak Sasmito mengatakan, tidak ada target pembangunan, sesuai dana turun”.<sup>178</sup>

“Bapak Jarmanto mengatakan, tidak ada jangka waktu, menyesuaikan kondisi”.<sup>179</sup>

“Bapak Anasrudin mengatakan, Tahun 2017, Januari sampai Desember secara 2 tahap 40% dan 60%”.<sup>180</sup>

Pelaksanaan pembangunan di desa tidak ditetapkan jangka waktunya, karena biasanya menyesuaikan keadaan dan kebijakan yang ditetapkan desa namun tidak keluar dari petunjuk teknis yakni pada tahun anggaran tersebut selama 12 bulan. Pengalokasian dana pada Tahun 2017 sebesar 40% pada tahap pertama dan 60% diberikan pada tahap kedua. Dana Desa (DD) yang sudah diberikan kepada, maka pihak desa harus sesegera mungkin melaksanakan satu persatu pembangunan yang sudah direncanakan.

“Bapak Sunardi mengatakan, kita seharusnya dari awal membuat *schedule* (jadwal), misalnya jalan ini volume sekian, target berapa hari mulai tanggal berapa sampai berapa, mestinya seperti itu tetapi rata-rata desa tidak membuat itu padahal sudah dianjurkan. Saya pernah mencoba membuat tapi tidak sesuai target, seperti Tahun 2017 target bulan November selesai, ternyata lokasi yang mau dipasang paving banjir, sehingga dilakukan penundaan”.<sup>181</sup>

---

<sup>177</sup> F2.W10. Tanggal 3 April 2018

<sup>178</sup> F4.W10. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>179</sup> F5.W10. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>180</sup> F1.W10. Tanggal 4 April 2018

<sup>181</sup> F3.W10. Tanggal 19 Maret 2018

Membuat jadwal pembangunan memang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang tepat waktu dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga sarana prasarana yang di bangun dapat sesegera mungkin dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadwal yang sistematis dapat memudahkan pelaksana dalam mentargetkan penyelesaian pembangunan, namun kondisi dilapangan terkadang tidak sesuai yang di rencanakan karena adanya kendala yang dapat menghambat pembangunan.

11. Peran serta masyarakat Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung dalam pemeliharaan infrastruktur desa.

“Bapak Slamet mengatakan, sebagian masyarakat ya membantu swadaya tenaga, sebagian lainnya memang bekerja di proyek pembangunan desa”.<sup>182</sup>

“Bapak Sunardi mengatakan, masyarakat berperan aktif, kalau sore turut membantu”.<sup>183</sup>

“Bapak Sasmito mengatakan, adanya swadaya masyarakat seperti makanan maupun tenaga untuk membantu pembangunan”.<sup>184</sup>

“Bapak Jarmanto mengatakan, masyarakat ikut bekerja kemudian digaji, sedang ada juga masyarakat yang membantu”.<sup>185</sup>

“Bapak Anasrudin mengatakan, peran masyarakat partisipatif”.<sup>186</sup>

Berdasarkan pemaparan informan masyarakat berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan desa. Masyarakat antusias atas pembangunan lingkungannya serta peningkatan infrastruktur yang dapat menunjang kegiatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal didasarkan pada

---

<sup>182</sup> F2.W11. Tanggal 3 April 2018

<sup>183</sup> F3.W11. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>184</sup> F4.W11. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>185</sup> F5.W11. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>186</sup> F1.W11. Tanggal 4 April 2018



pendayagunaan potensi sumberdaya lokal (sumber daya manusia (SDM), sumber daya kelembagaan, serta sumberdaya fisik) yang dimiliki desa.

12. Cara mengoptimalkan Dana Desa (DD) untuk pembangunan infrastruktur Desa.

“Bapak Anasrudin mengatakan pengelolaan Dana Desa (DD) dengan swakelola”<sup>187</sup>

“Bapak Sasmito mengatakan mengikuti aturan dan alur dari Desa”.<sup>188</sup>

“Bapak Slamet mengatakan, menyesuaikan pembangunan dengan dana yang sudah turun, agar pembangunan tetap berjalan meski dana belum turun secara keseluruhan sehingga pembangunan dilakukan secara bertahap”.<sup>189</sup>

Penyaluran Dana Desa (DD) ke desa dilakukan secara bertahap dan bukan sekaligus dengan pertimbangan pada triwulan I (Januari-Maret), pembangunan masih dalam proses persiapan sedangkan kebutuhan pembiayaan terbesar diperkirakan mulai April hingga Agustus. Pengelolaan Dana Desa (DD) secara swakelola dapat menyesuaikan perencanaan pembangunan dengan turunnya anggaran, seperti halnya membangun infrastruktur yang dapat dibiayai terlebih dahulu, sedangkan lainnya dibiayai dengan anggaran yang turun kemudian.

“Bapak Sunardi mengatakan, mengoptimalkan mutu bahan baku, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai acuan”.<sup>190</sup>

“Bapak Jarmanto mengatakan jika belum terbangun Tahun ini, maka usulan masuk realisasi tahun berikutnya”.<sup>191</sup>

---

<sup>187</sup> F1.W12. Tanggal 4 April 2018

<sup>188</sup> F4.W12. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>189</sup> F2.W12. Tanggal 3 April 2018

<sup>190</sup> F3.W12. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>191</sup> F5.W12. Tanggal 19 Maret 2018

Pemerintah desa dapat mengoptimalkan pembangunan desa melalui peningkatan mutu bahan baku, sehingga dana yang di alokasikan dapat di maksimalkan untuk pembangunan namun harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah di tetapkan. Usulan yang belum diterima pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) dapat diusulkan kembali pada tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan optimalisasi Dana Desa (DD) sehingga memprioritaskan pembangunan yang dapat memberikan kemanfaatan secara umum bagi masyarakat.

### 13. Kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

“Bapak Slamet mengatakan, biasanya keterlambatan pencairan dana, kalau kaitannya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) maupun warga tidak ada kendala, karena warga juga bersyukur bisa bekerja di proyek”.<sup>192</sup>

“Bapak Sunardi mengatakan, kendala ada pada masalah air, karena kondisi desa sering memperoleh kiriman pada saat musim penghujan sehingga menyebabkan banjir yang berimbas pada penundaan pembangunan”.<sup>193</sup>

“Bapak Sasmito mengatakan, tidak ada kendala pelaksanaan, semua sudah di *handle* oleh pemerintah desa”.<sup>194</sup>

“Bapak Jarmanto mengatakan, tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan”.<sup>195</sup>

Berdasarkan pemaparan informan, kendala yang dialami pada keterlambatan pencairan Dana Desa (DD), selain itu kondisi desa yang sering menerima kiriman air pada saat musim penghujan menyebabkan

---

<sup>192</sup> F2.W13. Tanggal 3 April 2018

<sup>193</sup> F3.W13. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>194</sup> F4.W13. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>195</sup> F5.W13. Tanggal 19 Maret 2018

genangan pada daerah yang sedang dibangun sehingga menghambat pembangunan. Pemerintah desa sebagai penanggung jawab utama memiliki kebijakan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi melalui musyawarah dan pengambilan keputusan yang telah dipertimbangkan.

“Bapak Anasrudin mengatakan, kendala kadang-kadang pada waktu pelaksanaannya turunnya dana tidak tepat waktu, penyusunan persyaratan penyaluran molor, dalam pemesanan dan pengadaan barang dari pihak ketiga kurang tepat sehingga mempengaruhi pelaksanaan”.<sup>196</sup>

Pemaparan informan dikuatkan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) bahwa pada proses pembangunan, desa mengalami kendala berupa keterlambatan pencairan dana yang tidak tepat. Hal ini disebabkan kekurangan persyaratan penyusunan yang di ajukan, sehingga terjadi kendala pada saat penyaluran dana. Kendala lain yang di alami desa, adanya keterlambataan pengadaan barang dari pihak ketiga, sehingga pelaksanaan mengalami penundaan.

14. Pihak desa dalam mengatasi kendala yang muncul saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

“Bapak Slamet mengatakan, mengambil kebijakan untuk mengatasi kendala yang ada”.<sup>197</sup>

“Bapak Sunardi mengatakan, melalui pembangunan saluran air yang baik, sehingga air kiriman dari Desa lain dapat langsung mengalir ke sungai besar tanpa menggenang di Desa Ngrance”.<sup>198</sup>

“Bapak Sasmito mengatakan, merupakan kebijakan pemerintah desa, mengikuti saja”.<sup>199</sup>

---

<sup>196</sup> F1.W13. Tanggal 4 April 2018

<sup>197</sup> F2.W14. Tanggal 3 April 2018

<sup>198</sup> F3.W14. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>199</sup> F4.W14. Tanggal 19 Maret 2018

“Bapak Jarmanto mengatakan, mengikuti kebijakan dari desa”.<sup>200</sup>

Kendala yang muncul pada saat pembangunan dapat di selesaikan, melalui musyawarah dan pengambilan kebijakan pemerintah desa untuk meningkatkan percepatan pembangunan. Kondisi desa yang sering mengalami banjir pada saat musim penghujan dapat di atasi dengan pembangunan saluran air (*drainase*), air yang dapat mengalir ke sungai besar dengan lancar, dapat mengurangi genangan di desa sehingga pembangunan sarana prasarana fisik desa dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

“Bapak Anasrudin mengatakan, peran Dinas Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung, melakukan pembinaan dengan pertemuan dan pemantauan ke desa.”<sup>201</sup>

Sebelum melaksanakan pembangunan desa, Dinas Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung memberikan pembinaan terkait pelaksanaan pembangunan, namun pelaksanaannya disesuaikan kebijakan desa masing-masing selama sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan. Pemantauan ke lapangan diperlukan untuk mengetahui kondisi geografis desa serta arah kebijakan yang harus diambil pada saat mengalami kendala.

#### 15. Peran pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian desa.

“Bapak Slamet mengatakan sudah lebih baik, masyarakat dapat merasakan manfaatnya”.<sup>202</sup>

---

<sup>200</sup> F5.W14. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>201</sup> F1.W14. Tanggal 4 April 2018

<sup>202</sup> F2.W14. Tanggal 3 April 2018

“Bapak Sunardi mengatakan, mempermudah kepasar, ada jembatan antar Desa Ngrance dan Wates sebagai sarana penghubung untuk ke pasar Desa Ngrance”.<sup>203</sup>

“Bapak Sasmito mengatakan, sangat menunjang, orang yang mau kepasar jalannya enak, pengairan untuk pertanian juga enak”.<sup>204</sup>

“Bapak Jarmanto mengatakan, menunjang karena jalan bagus, mudah”.<sup>205</sup>

Wilayah pertanian yang luas dan pasar desa yang berada di tempat strategis, mudah dijangkau baik masyarakat desa asal maupun luar desa. Hal ini sangat potensial meningkatkan perputaran roda perekonomian. Infrastruktur jalan menunjang perekonomian, karena adanya jalan yang bagus memudahkan akses kepasar, maupun ke sawah. Pembangunan jembatan juga berkontribusi dalam menghubungkan antar desa, sehingga masyarakat dalam memanfaatkan kemudahan dalam beraktifitas antar desa didukung adanya pembangunan jembatan sebagai penghubung.

“Bapak Anasrudin mengatakan, Tahun 2015 sampai 2017 infrastruktur paling besar dilaksanakan di Desa, pembangunan jalan, jembatan, gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), untuk pemberdayaan masih minim.”<sup>206</sup>

Fokus Dana Desa (DD) dalam 3 tahun pertama pada peningkatan infrastruktur desa, sehingga desa mendapatkan kesempatan membangun sarana prasarana penunjang perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahap memaksimalkan pembangunan infrastruktur dapat dicapai pada tahun anggaran sebelumnya dijadikan bahan pertimbangan untuk pembangunan tahun anggaran berikutnya.

---

<sup>203</sup> F3.W14. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>204</sup> F4.W14. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>205</sup> F5.W14. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>206</sup> F1.W14. Tanggal 4 April 2018

Program Dana Desa (DD) pemberdayaan masyarakat, masih mengalami proses penyempurnaan baik alokasi dana dan petunjuk teknisnya untuk dapat diterapkan pada tahun berikutnya.

16. Realisasi pembangunan infrastruktur Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung.

“Bapak Slamet mengatakan layak mengikuti peningkatan, bahkan desa memberi tambahan namun ada batasan untuk memenuhi tambahan pembangunan”.<sup>207</sup>

“Bapak Sunardi mengatakan, dilakukan pemerataan pembangunan pada semua lingkungan”.<sup>208</sup>

“Bapak Sasmito mengatakan, talud, drainase (saluran irigasi) dan suaka jalan, bagi masyarakat petani jalan bagus dan pengairan yang lancar, mereka sudah senang”.<sup>209</sup>

“Bapak Jarmanto mengatakan, masyarakat senang, karena dibangun tambah bagus”.<sup>210</sup>

Realisasi pembangunan desa sudah bagus, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan infrastruktur di dorong adanya kontribusi berbagai pihak untuk mensukseskan pembangunan desa. Kualitas pembangunan yang telah dilaksanakan juga lebih baik, dengan di dukung peningkatan anggaran Dana Desa (DD). Masyarakat yang mayoritas sebagai petani, mendukung program pembangunan karena sangat bermanfaat seperti adanya pembangunan jalan di lingkungan pertanian memudahkan akses ke sawah serta pengangkutan hasil panen di dukung adanya saluran air yang dapat mengalirkan air ke sawah, meningkatkan hasil

---

<sup>207</sup> F2.W17. Tanggal 3 April 2018

<sup>208</sup> F3.W17. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>209</sup> F4.W17. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>210</sup> F5.W17. Tanggal 19 Maret 2018

pertanian. Pedagang di pasar desa juga merasakan kemudahan akses distribusi barang yang didukung oleh peningkatan infrastruktur.

“Bapak Anasrudin mengatakan, realisasi pembangunan Desa Ngrance sudah bagus sesuai dengan aturan. Pembangunan desa dikatakan berhasil dari tahap perencanaan hingga pelaporan serta didukung sumberdaya manusia yang aktif dan disiplin, pembangunan infrastruktur Desa Ngrance pengelolaannya bermanfaat untuk masyarakat”.<sup>211</sup>

Realisasi pembangunan berhasil sesuai dengan perencanaan hingga pelaporan serta didukung sumberdaya manusia yang aktif dan disiplin sehingga dapat memaksimalkan pembangunan fisik sesuai dengan kebutuhan. Kerjasama antara pemerintah desa, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan masyarakat dapat memberikan dampak positif pada percepatan pembangunan, sehingga bermanfaat untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

#### 17. Realisasi pembangunan infrastruktur desa yang sudah terlaksana.

“Bapak Slamet mengatakan, di beberapa titik pembangunan jalan”.<sup>212</sup>

“Bapak Sunardi mengatakan, pembangunan di Desa Ngrance, menyeluruh”.<sup>213</sup>

“Bapak Sasmito mengatakan, tersebar diseluruh RT diwilayah Dusun Ngrance”<sup>214</sup>

“Bapak Jarmanto mengatakan, pembangunan tersebar di Desa Ngrance ada 10 RT pembangunan dilakukan sesuai prioritas dan kebutuhan”.<sup>215</sup>

---

<sup>211</sup> F1.W17. Tanggal 4 April 2018

<sup>212</sup> F2.W17. Tanggal 3 April 2018

<sup>213</sup> F3.W17. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>214</sup> F4.W17. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>215</sup> F5.W17. Tanggal 19 Maret 2018

“Bapak Anasrudin mengatakan, lokasi yang telah ditetapkan oleh pihak Desa”.<sup>216</sup>

Berdasarkan pemaparan informan, titik realisasi pembangunan tersebar di berbagai wilayah desa. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerataan pembangunan di desa. Prinsip keadilan dan tidak memihak dengan mempertimbangkan kebutuhan di wilayah desa, dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa dengan terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan proses pembangunan sebagai upaya mendorong pembangunan nasional demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan.

#### 18. Aksesibilitas pembangunan yang telah dilakukan.

“Bapak Slamet mengatakan, jalan yang sudah bagus memudahkan akses masyarakat, mau ke pasar juga dirasakan oleh desa lain yang ke pasar Ngrance”.<sup>217</sup>

“Bapak Sunardi mengatakan, dapat memudahkan kegiatan dipasar maupun pertanian”.<sup>218</sup>

“Bapak Sasmito mengatakan, memudahkan orang dalam menunjang kegiatan masyarakat, seperti pertanian”.<sup>219</sup>

“Bapak Jarmanto mengatakan, seperti *talud* (penyangga jalan) berdampak pada saluran air baik yang dapat menyalurkan air menjadi lancar”.<sup>220</sup>

“Bapak Anasrudin mengatakan, kemanfaatan oleh masyarakat dari pembangunan itu”.<sup>221</sup>

---

<sup>216</sup> F1.W17. Tanggal 4 April 2018

<sup>217</sup> F1.W18. Tanggal 4 April 2018

<sup>218</sup> F3.W18. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>219</sup> F4.W18. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>220</sup> F5.W18. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>221</sup> F1.W18. Tanggal 4 April 2018



Berdasarkan pemaparan informan, mengembangkan potensi desa harus didukung berbagai bidang yang berkaitan, seperti bidang pembangunan fisik memegang peran penting dalam meningkatkan perekonomian. Masyarakat yang mayoritas petani dapat meningkatkan swasembada pangan di dukung adanya aksesibilitas. Pasar desa yang melibatkan masyarakat setempat membutuhkan aksesibilitas untuk menunjang distribusi barang, sehingga pembangunan yang telah dilakukan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

#### 19. Kualitas infrastruktur pembangunan desa.

“Bapak Sasmito, menyatakan kualitas pembangunan bagus karena dikerjakan masyarakat sendiri, untuk lingkungannya sendiri, bukan borongan yang lain kualitasnya”.<sup>222</sup>

“Bapak Jarmanto menyatakan, bagus, masyarakat suka wilayahnya dibangun lebih baik”.<sup>223</sup>

Pelaksanaan Dana Desa (DD) dilakukan dengan swakelola menggunakan tenaga kerja dari masyarakat desa setempat sehingga penghasilan dan peningkatan daya beli masyarakat tetap terjaga dan mendorong kegiatan-kegiatan masyarakat yang produktif secara ekonomi. Tenaga kerja dari masyarakat cenderung lebih memperhatikan kerapian dan kualitas dari hasil pekerjaannya, sehingga pihak terkait puas dengan hasilnya.

“Bapak Slamet mengatakan menjaga kualitas dari pelaksanaan pembangunan, namun biasanya waktu molor yang harusnya 1

---

<sup>222</sup> F4.W19. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>223</sup> F5.W19. Tanggal 19 Maret 2018

bulan menjadi 1,5 bulan akhirnya terjadi pembengkakan upah, nanti akan diambilkan dari Penghasilan Asli Desa (PAD)”.<sup>224</sup>

Kualitas pembangunan infrastruktur lebih bagus dibanding tahun sebelumnya, meskipun dalam menjaga kualitas pembangunan diperlukan biaya tambahan. Desa sebagai penanggung jawab, mengambil kebijakan dengan mengambil sebagian dari Penghasilan Asli Desa (PAD) untuk menutup biaya tambahan yang muncul. Hal ini terjadi karena anggaran dana dari pemerintah terbatas, sedangkan pembangunan yang dilakukan mengalami keterlambatan target penyelesaian, untuk membayar biaya diluar anggaran, dianggarkan melalui Penghasilan Asli Desa (PAD).

“Bapak Sunardi mengatakan peningkatan kualitas dari pengalaman tahun sebelumnya”.<sup>225</sup>

Pengelolaan Dana Desa (DD) dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan belajar pengalaman sebelumnya, sehingga Tahun 2017 bisa dikatakan puas pencapaian dari proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan realisasi pembangunan infrastruktur Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Kualitas pembangunan fisik yang bagus melengkapi kesuksesan pencapaian desa dalam mengelola Dana Desa (DD).

“Bapak Anasrudin mengatakan pembangunan fisik di Desa Ngrance baik sesuai yang dikehendaki oleh masyarakat, *talud* (penyangga jalan), jalan paving dan sanitasi yang menjadi kebutuhan masyarakat di prioritaskan, di dahulukan.”<sup>226</sup>

---

<sup>224</sup> F2.W19. Tanggal 3 April 2018

<sup>225</sup> F3.W19. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>226</sup> F1. W19. Tanggal 4 April 2018

Pemenuhan sarana dan prasarana desa melalui pembangunan fisik, sesuai dengan usulan masyarakat. Prioritas pembangunan dilakukan dengan mengoptimalkan dana yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Kualitas pembangunan sudah bagus sesuai dengan standar yang diberikan pada petunjuk teknis yang dijadikan sebagai pedoman.

20. Apa saja tolak ukur pembangunan Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung?

“Bapak Sasmito mengatakan, dikatakan bagus, mengacu pada kualitas infrastruktur”.<sup>227</sup>

“Bapak Jarmanto mengatakan, dana tersalurkan memenuhi target dan membangun lebih baik”.<sup>228</sup>

“Bapak Sunardi mengatakan, masyarakat merasa puas akan kualitas pembangunan di Desa Ngrance”.<sup>229</sup>

Kualitas pembangunan infrastruktur lebih bagus dari tahun sebelumnya, sarana prasarana yang belum terbangun, tahun ini sudah terbangun. Dana Desa (DD) yang dianggarkan dapat terealisasi secara optimal dalam meningkatkan kualitas pembangunan sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat. Masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pemantauan pembangunan. Hal ini merekatkan hubungan baik antara desa dengan masyarakat sebagai dampak positif terpuhinya pembangunan fisik yang dibutuhkan masyarakat.

“Bapak Slamet mengatakan belum cukup puas, karena saya berharap Desa Ngrance dapat dinikmati total baik pedagang maupun petani.”<sup>230</sup>

---

<sup>227</sup> F4.W20. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>228</sup> F5.W20. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>229</sup> F3.W20. Tanggal 19 Maret 2018

<sup>230</sup> F2. W20. Tanggal 3 April 2018

Harapan adanya peningkatan infrastruktur di Desa Ngrance menjadi motivasi Kepala Desa maupun perangkat desa untuk meningkatkan pembangunan, selama ini tolak ukur pembangunan dilihat dari manfaat yang dapat diberikan untuk masyarakat. Petani membutuhkan jalan sebagai akses menuju sawah, jika tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai dapat menurunkan tingkat kesejahteraan karena mayoritas masyarakat desa Ngrance bermata pencaharian sebagai petani dan bergantung pada hasil pertanian, swasembada pangan.

Kesejahteraan masyarakat desa Ngrance, selain ditunjang melalui pertanian, juga melalui perdagangan. Pasar desa merupakan aset desa yang menunjang perekonomian desa Ngrance selain sebagai tempat untuk menjual hasil pertanian desa Ngrance juga dapat meningkatkan proses jual beli barang, karena desa Ngrance merupakan satu-satunya desa yang memiliki pasar di Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung.

“Bapak Anasrudin mengatakan masih 3 Tahun istilahnya belum bisa dikatakan berjalan 100%, kalau dikatakan berhasil dilaksanakan sesuai (Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dana Desa (DD) dan di SPJ (Surat pertanggung Jawaban) dengan benar dalam mengelola Dana Desa (DD)”<sup>231</sup>

Tolak ukur keberhasilan pembangunan belum bisa di ukur di tahun ketiga, namun secara keseluruhan kondisi desa, merupakan desa tertib administrasi yang telah melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan mampu mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa (DD). Hal ini dapat dilihat melalui laporan (Dokumen Pelaksana

---

<sup>231</sup> F1. W20. Tanggal 4 April 2018

Anggaran (DPA) Dana Desa (DD) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang merupakan bentuk laporan penggunaan anggaran sesuai dalam mengelola Dana Desa (DD)".